

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah, baik dilaut maupun didarat. Modal dasar sumber daya tersebut harus dilindungi, dijaga, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya. Dengan menyeimbangkan keselarasan dan juga keserasian baik antara manusia dengan Tuhannya maupun manusia dengan lingkungannya. Sumber daya alam mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat secara regional. Sumber daya tersebut adalah hutan, yang merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.

Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang sangat besar peranannya dalam berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial dan ekologi, dengan keanekaragaman flora dan fauna yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Hutan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan atau kelangsungan hidup manusia, baik itu untuk pengatur tata air, pencegahan bahaya banjir, erosi, pelestarian kesuburan tanah, dan guna pelestarian lingkungan hidup sehingga dapat dimanfaatkan secara baik. Hutan merupakan kekayaan alam milik bangsa dan negara yang tak ternilai, sehingga hak-hak bangsa atas negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan, agar hutan tersebut

memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri (Zain, 2000: 127).

Hutan dan kawasan hutan secara konseptual yuridis dirumuskan didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang no 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UUPK) dimana hutan merupakan suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya hutan suatu areal yang cukup luas, yang didalamnya bertumbuhan kayu, bambu, dan palem, beserta dengan tanahnya beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari (Zain, 2000: 01).

Menurut UU No 41 tahun 1999, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Keberadaan hutan menjadi salah satu bentuk investasi bagi masyarakat terutama masyarakat desa atau masyarakat petani yang dalam masa hidupnya hanya mengandalkan tanah dan hutan dalam melakukan pekerjaan yaitu sebagai petani. Didalam pertanian tentunya akan melihat lebih besar pada masyarakat pedesaan, karena pedesaan merupakan tempat pelaksanaan pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan hidup manusia baik itu untuk masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan itu sendiri.

Pemanfaatan hutan menjadi tujuan dalam kelangsungan hidup masyarakat

petani yaitu dengan pemanfaatan yang baik dan juga bijak. Didalam pemanfaatan sumber daya alam yang baik seyogyanya membawa dampak yang baik pula bagi generasi selanjutnya dalam hal pemanfaatan hutan sebagaimana fungsi dan guna hutan bagi manusia. Hutan yang dikelola oleh masyarakat petani menjadi penunjang atau peningkatan perekonomian bagi masyarakat lokal maupun nasional, dengan adanya hasil sumber daya alam berupa hutan menjadikan taraf hidup masyarakat akan menjadi lebih baik dan meningkat.

Pada pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya (Rianse, 2010: 43). Pemanfaatan hutan juga harus diseimbangkan dengan keberadaan ekosistem alam maupun lingkungannya, dengan melihat keberadaan flora dan fauna yang menjadi tempat atau tumbuh kembang yang merupakan habitat aslinya. Pemanfaatan atau pengelolaan hutan menjadi tujuan khalayak yang mesti mempertimbangkan ekosistem di alam tersebut.

Kawasan hutan yang juga masih terus menjadi tempat aktivitas masyarakat dalam menggunakan sumber daya alam berupa hutan yaitu adalah Bangka Belitung. Bangka Belitung merupakan salah satu pulau yang kaya akan potensi seperti destinasi wisata, wisata kuliner dan juga wisata alam yang masih cukup asri seperti hutan. Bangka Belitung mempunyai luas wilayah 1.642.000 ha, yaitu dengan luas hutan 654.562,00 ha. Hutan yang ada di Bangka Belitung dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat sebagai tempat bertani atau berkebun, yaitu dikarenakan mayoritas masyarakat Bangka Belitung adalah

petani. Pemanfaatan tersebut berupa pemanfaatan kayu atau pohon yang bisa dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat. Hal yang juga menjadi potensi dari hutan tersebut adalah tanah, yang merupakan sumber atau modal utama bagi masyarakat yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam waktu yang relatif lama. Kawasan hutan di Bangka Belitung juga masih menjadi polemik dalam pemanfaatan hutan yaitu adalah kawasan hutan konservasi yang terletak di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka.

Berdasarkan data dari profil desa, Desa Berbura merupakan salah satu desa dengan luas wilayah 35.120 km². Luas wilayah tersebut mencakup hutan konservasi dan hutan lindung. Hutan yang ada di desa tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan, sebagai tempat bermukim dan sebagian besar yaitu sebagai tempat berkebun atau bertani. Hutan konservasi dan hutan lindung dengan luas 23,412 km², hutan dengan status hutan konservasi ini menjadi hutan yang berfungsi sebagai tempat ataupun ekosistem binatang maupun pelestarian hutan.

Perambahan hutan semakin aktif dilakukan oleh masyarakat dikalangan para petani yang ingin memanfaatkan hutan menjadi sumber mata pencarian atau pendapatan. Perambahan hutan di Desa Berbura menjadi jalan alternatif dalam mempertahankan maupun meningkatkan kehidupan masyarakat petani. Dengan sumber daya alam yang melimpah menjadi faktor pendorong bagi sebagian masyarakat petani desa Berbura yang ingin terus menyambung hidup, walaupun dengan menggunakan hutan yang berstatus hutan konservasi. Aktivitas masyarakat dalam merambah hutan konservasi kian terus berlangsung di dalam

masyarakat tersebut dengan membuka lahan sebagai pertanian maupun kebutuhan lain bagi para petani.

Mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani dan ditunjang dengan taraf kehidupan perekonomian masyarakat menengah kebawah menjadikan perambahan hutan terus meningkat. Pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa Berbura berbenturan dengan status hutan tersebut, akan tetapi kebutuhan hidup masyarakat menjadi prioritas utama sehingga kehidupan masyarakat akan terus berlangsung. Hal ini menjadi menarik untuk melakukan kajian tentang tindakan dan aktivitas masyarakat dalam melakukan perambahan hutan konservasi di Desa Berbura Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perambahan hutan konservasi di Desa Berbura?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Berbura melakukan perambahan hutan konservasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bentuk perambahan hutan konservasi di Desa Berbura.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa Berbura melakukan perambahan hutan konservasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis
 - a. Diharapkan bermanfaat dalam akademik terutama dalam pengembangan disiplin ilmu khususnya sosiologi dalam menambah khasanah kajian dalam bidang sosiologi ekonomi.
 - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pembelajaran tentang perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan panduan bagi aparat desa dalam memberikan sosialisasi tentang perambahan hutan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat.
 - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam tindakan melakukan perambahan hutan yang berstatus hutan konservasi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini diperlukan karena fungsinya sebagai tujuan memuat rangkuman dan uraian secara lengkap dan mutakhir terkait topik yang diangkat, sebagaimana yang ditemukan dalam buku-buku ilmiah, jurnal maupun artikel.

Pertama didalam penelitiannya Oktinaldi (2012) dengan judul “Pola Pengelolaan Hutan Lindung Sebagai Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Kasus Di Kenegarian Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok)”. Penelitian ini dilatarbelakangi pertanian merupakan salah satu peranan penting dari perekonomian nasional, hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk

atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian terutama bagi sebagian masyarakat pedesaan yang sangat menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian. Untuk itu para petani pedesaan selalu berusaha memperbaiki proses pertaniannya dari kendala-kendala yang dibawa oleh arus globalisasi yang melanda kehidupan mereka. Salah satu cara yang dilakukan masyarakat Nagari Air Dingin untuk keluar dari kendala-kendala tersebut adalah melakukan pengolahan kawasan hutan lindung sebagai penambahan areal pertanian. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu dapat diketahui bahwa pengolahan kawasan hutan merupakan hasil perilaku, hasil adaptasi masyarakat dari menanggapi persoalan penambahan penduduk yang mempengaruhi faktor ketersediaan lahan pertanian. Pengolahan kawasan hutan tersebut berkembang ditengah pertanian masyarakat, karena juga diiringi oleh faktor lain seperti pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang kesuburan tanah, jenis tanaman yang diusahakan, serta faktor ekonomi dan nilai kepemilikan tanah. Dalam pengolahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat terdapat tiga aspek budaya yang secara universal menjebatani pola hubungan manusia dengan lingkungan antara lain teknologi, organisasi sosial dan pola-pola demografi. Tiga aspek budaya ini berperan aktif serta merupakan bagian faktor yang mendukung terjadinya pengolahan kawasan hutan sebagai penambahan areal pertanian bagi masyarakat.

Kedua di dalam penelitiannya Rino Adwat (2014) dengan judul “Pengelolaan Hutan Konservasi Desa Bagi Resistensi Masyarakat Desa Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong (Studi Kasus Desa

Ladang Palembang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu)”. Penelitian ini dilatarbelakangi hutan memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (manusia) khususnya yang tinggal disekitaran tepi hutan. Masih banyaknya masalah sosial, terutama upaya pemenuhan kebutuhan keluarga khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan (tepi hutan).

Pemeliharaan hutan adat dilaksanakan oleh masyarakat lokal desa Ladang Palembang secara swadaya dan musyawarah untuk penetapan program. Tahapan-tahapan yang dimulai dari pembentukan kelompok dan menjalankan program hutan konservasi merupakan keinginan yang kuat dari masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan desa Ladang Palembang. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan lahan pengelolaan hutan meliputi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berjalan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Ladang Palembang dan sekitarnya, dalam melakukan rehabilitasi dalam kawasan hutan masyarakat yang menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat desa Ladang Palembang.

Penelitian yang ketiga yaitu Intan Silvia Dale (2012) dengan judul Pengelolaan Hutan Rakyat (Studi kasus Komunitas Dusun Bogoran, Wonosobo) Penelitian ini dilatarbelakangi salah satu upaya untuk menunjang keseimbangan ekosistem alam dan kebutuhan ekonomi adalah pembentukan hutan rakyat. Hutan rakyat merupakan salah satu model pengelolaan sumber daya alam yang

berdasarkan inisiatif masyarakat. Hutan rakyat ini dibangun oleh swadaya masyarakat, ditunjukan untuk menghasilkan kayu atau komoditas lainnya secara ekonomis, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan hutan tidaklah semata-mata akibat interaksi alami antara komponen botani, mikro organisme, mineral tanah, air, dan udara, melainkan juga adanya peranan manusia dan kebudayaannya. Kreasi budaya yang dikembangkan dalam interaksinya dengan hutan rakyat dapat dikelola secara lestari. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu hutan rakyat merupakan bentuk guna lahan yang dominan di Bogor, dalam hutan tersebut terdapat beberapa jenis tanaman. Hutan rakyat tersebut sudah lama dikelola oleh masyarakat atau warga Bogor hal ini dikarenakan hutan wanatani adalah bidang utama pekerjaan sejak dulu. Hutan rakyat ini menjadi sumber produksi, penghasilan warganya, dan juga sumber pakan ternak. Warga atau masyarakat Bogor menyadari pentingnya arti hutan secara ekonomi dan ekologis bagi kehidupan mereka. Petani hutan di Bogor memiliki pola pikir yang sederhana terhadap hutan rakyat yaitu mereka hidup dari hutan, sehingga hutan terus dikelola dengan baik agar hutan dapat terus menghasilkan secara ekonomi untuk kebutuhan mereka dan warga bogor melihat hutan rakyat tersebut sebagai kehidupannya.

Penelitian yang keempat yaitu dalam penelitiannya Roswanti Fatimah (2011) dengan judul “Upaya Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat Dalam Mengurangi Laju Kerusakan Hutan”. Penelitian ini dilatarbelakangi Perum Perhutani merupakan salah satu instrumen penting

dalam memberikan upaya untuk mengurangi laju kerusakan hutan. Dalam menangani persoalan tersebut diperlukan kegiatan yang dapat mengurangi laju kerusakan hutan, sehingga tingkat kerusakan hutan dapat ditangani. Salah satu upaya Perum Perhutani yang sejatinya dapat membantu menangani masalah kerusakan hutan, yaitu melalui usaha menekan lajunya kerusakan hutan.

Salah satu upaya pendekatan yang cukup efektif dalam menekan lajunya kerusakan hutan melalui upaya-upaya dari Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Barat untuk bisa melibatkan dan mendorong masyarakat dalam pengurusan hutan. Perum Perhutani berwenang mengurus yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu melalui penyuluhan kehutanan. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan serta melakukan pengawasan kehutanan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Dari hasil pengamatan menunjukan bahwa, hutan di daerah Banyumas Barat salah satu daerah yang mengalami kerusakan hutan seperti yang terjadi pada RPH Cikonde, BKPH Rawa Timur, Cilacap sekitar 40 petak dengan luas 1.495,10 ha, sebagai perwujudan dalam mengurangi laju kerusakan maka adanya upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani Banyumas Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat yaitu: (1) Faktor manusia meliputi terjadinya pencurian kayu oleh masyarakat sekitar hutan secara perorangan karena sikap petugas memberikan kelonggaran sanksi awal bagi pelaku pencurian serta himpitan ekonomi, tindakan pembabatan tanaman, munculnya masalah penyerobotan kawasan hutan (tenurial) sebagai tindakan mengambil alih hutan milik negara menjadi milik pribadi. (2) Faktor keteledoran pasangem membakar ranting. Selanjutnya mengenai upaya Perum Perhutani KPH Banyumas dalam mengurangi laju kerusakan hutan yaitu: (1) Upaya preventif meliputi Program PHBM, Patroli Ruti dan Gabungan, Kegiatan Komunikasi Sosial, Peningkatan Kualitas Petugas Pengamanan Hutan, Program Reboisasi. (2) Upaya represif melalui Operasi Gabungan dengan Polsek setempat meliputi kendala-kendala dalam mengurangi laju kerusakan hutan di KPH Banyumas Barat meliputi kendala intern yaitu pihak Perhutani, pelaksanaan hukum, dan faktor dari luar (masyarakat) yaitu tingkat kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan dan keterbatasan modal.

Dari keempat penelitian tersebut terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan yang dilakukan oleh penelitian dengan peneliti. Persamaan dari keempat penelitian tersebut adalah bagaimana masyarakat tersebut memiliki kesamaan didalam menggunakan dan memanfaatkan hutan yaitu dengan tujuan sebagai perluasan hutan yang berguna bagi kepentingan masyarakat umum, baik

itu dalam pemanfaatan hutan yaitu penggunaan kayu, tanah, pertanian dan perkebunan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah dalam cara pemanfaatan ataupun pengelolaan hutan yang berstatus hutan lindung seperti dalam penelitiannya Oktinaldi, dalam penelitiannya Rino adwat yaitu tentang pengelolaan hutan konservasi dan Intan Silvia Dale yaitu pengelolaan hutan rakyat, antara lain dengan cara pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, terkait guna hutan tersebut bagi masyarakat, sedangkan dalam penelitiannya Roswanti adalah adanya upaya yang dilakukan oleh perum perhutani pemangkuan hutan (KPH) dalam mengurangi kerusakan hutan yang terjadi di Banyumas Barat.

F. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh James Samuel Coleman (Perilaku Sosial Beorientasi Ekonomi) yaitu tentang pilihan rasional, yang digunakan untuk mengkaji fokus permasalahan dalam penelitian ini. Prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktorpun dipandang mempunyai pilihan atau nilai, keperluan, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihannya. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor (Upe, 2010:193-194).

Menurut Coleman (Dalam Ritzer, 2007: 394) dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai dan pilihan (preferensi)” tetapi, Coleman selanjutnya menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, Coleman memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

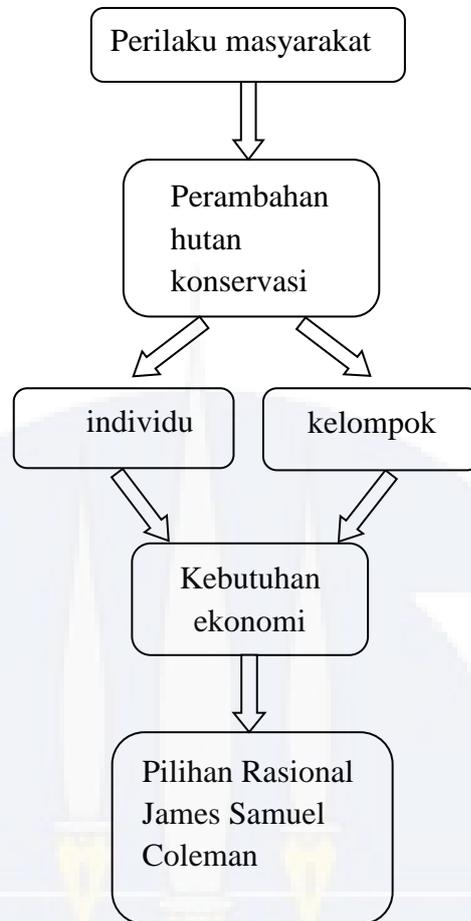
Ada dua unsur utama dalam teori pilihan rasional yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Dalam hal ini interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ke tingkat sistem sosial, dimana basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan. Dengan menggunakan pendekatan pilihan rasional, Coleman menguraikan beberapa fenomena tingkat makro, misalnya perilaku kolektif. Coleman menjelaskan perilaku kolektif dengan cirinya yang tidak stabil dan sukar dianalisis dengan menggunakan cara pandang teori pilihan rasional.

Perilaku kolektif merupakan upaya beberapa aktor untuk memaksimalkan kepentingan mereka, masing-masing individual dalam memaksimalkan upaya tersebut, menyebabkan terjadinya keseimbangan kontrol diantara beberapa aktor sehingga menyebabkan pula keseimbangan dalam masyarakat. Dalam artian bahwa baik aktor kolektif maupun aktor individual mempunyai tujuan, demikian

pula dengan halnya norma. Norma diprakarsai dan dipertahankan oleh beberapa orang yang melihat keuntungan yang dihasilkan dan kerugian yang berasal dari pelanggaran norma tertentu. Norma merupakan fenomena tingkat makro yang lahir berdasarkan tindakan bertujuan di tingkat mikro (Upe, 2010: 193-195).

Berikutnya adalah aktor korporat, didalam suatu kelompok kolektif, aktor tidak boleh bertindak menurut kepentingan pribadi mereka, akan tetapi harus bertindak menurut kepentingan kolektivitas. Aturan dan mekanisme untuk beralih dari pilihan individual kepilihan kolektif (sosial), yaitu contohnya dalam pemungutan suara dan prosedur untuk menabulasikan suara individu dan memajukan keputusan kolektif. Inilah dimensi dari mikro ke makro, baik aktor kolektif maupun aktor individual mempunyai suara dan tujuan yang sama bagi kepentingan kolektifitas tersebut (Ritzer, 2007: 398). Dalam penelitian ini terjadinya suatu pilihan-pilihan yang rasional yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para petani dalam menentukan suatu tujuan dan kepentingan yang bermanfaat bagi mereka.

G. Alur Pikir



Berdasarkan skema alur pikir diatas, peneliti dapat menjelaskan bahwa proses penelitian ini bermula dari perilaku masyarakat yang melakukan kegiatan perambahan hutan konservasi di Desa Berbura. Hutan konservasi merupakan hutan yang menjadi tindakan perambahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini yaitu kebutuhan primer yang mencakup kebutuhan tempat mencari nafkah, membuat rumah dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang menjadi permasalahannya adalah pada status hutan tersebut, yang semestinya tidak boleh digunakan atau dirambah oleh masyarakat atau oleh pihak manapun dikarenakan

berstatus hutan konservasi. Hutan konservasi mempunyai aturan hukum atau undang-undang yang berlaku terhadap hutan tersebut akan tetapi masyarakat ataupun penduduk yang bermukim di Desa Berbura melakukan perambahan hutan tersebut yaitu sesuai dengan tujuan tertentu. Perambahan dilakukan oleh masyarakat baik itu secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Berbura. Dalam hal ini mayoritas masyarakat desa Berbura melakukan perambahan terhadap hutan konservasi yang dilakukan dalam jumlah yang cukup luas. Kemudian kondisi ini di jelaskan dalam teori Coleman, yaitu teori pilihan rasional tentang aktor dan sumber daya. Dalam teori ini juga menjelaskan mengenai berjalan atau berperannya aktor kolektif, norma, serta aktor korporat sehingga terjadinya keseimbangan didalam masyarakat.